

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2023, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Amrani, Hanafi *et.all*, 2017, “*Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implementasinya dalam Praktek Penegakan Hukum*”, Laporan Penelitian Kolaborasi FH UII, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagong, Suyatna, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwi Haryati, dkk., 2024, *Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*, Rajawali Pers, Depok.
- Eduardus, Tandelilin, 2007, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, BPF, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Lumban Batu, Pantas, 2010, *Perdagangan Berjangka Futures Trading*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Margono, S., 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_. 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2021, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta
- Samsul, Mohamad, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Salemba Empat, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemardjono, Maria S.W., 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Suteki dan Taufani, Galang, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Witanto, D.Y., 2012, *Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual*, Mandar Maju, Bandung.

**Jurnal:**

- Ais, Chatamarrasjid, 2002, *Ultra Vires dan Pertanggungjawaban Direksi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta.

Namira, Sheila. 2022. “Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka...” *Cendekia Niaga* 6 (1).

Madril, Oce, dan Jery Hasinanda. 2021, “Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 4.

Rozali, Asep. 2011, “Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dalam Praktik Perbankan.” *Jurnal Wawasan Hukum*.

### **Karya Ilmiah:**

Harwiadi, R., 2017, *Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hartono, I Dewa Gede Made Sugi, 2019, *Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsi yang Negatif terhadap Kerugian Keuangan Negara yang Dimanfaatkan untuk Kepentingan Umum pada Perkara Korupsi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kusuma, Rusdianto M., 2008, *Perbandingan Jual Beli Salam dengan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Noor, Hendry Julian, 2018, *Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Panjaitan, Amser Irawan, 2024, *Keabsahan Perjanjian Investasi Berjangka antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang Dibuat Secara Elektronik dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jakarta.

### **Arsip Resmi:**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 2019, *Buletin Edisi 208 Juni 2019*, Jakarta.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 2024, *Laporan Kinerja Tahun 2024*, Jakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, *Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Tarumartani*, Arsip Kejaksaan Tinggi DIY, Yogyakarta.

**Internet:**

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023, “Tren Vonis Kasus Korupsi 2014–2023,” <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2023-0>, diakses 1 Agustus 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2025, “Data Penindakan Tindak Pidana Korupsi,” <https://www.kpk.go.id>, diakses 5 Agustus 2025.

Kompas.com, 2024, “Dirut PT Taru Martani Jadi Tersangka Korupsi, Kerugian Negara Mencapai Rp 18,7 Miliar,” <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/05/28/184610278/dirut-pt-taru-martani-jadi-tersangka-korupsi-kerugian-negara-mencapai-rp>, diakses 28 Mei 2025.

Indozone, 2024, “Kejati DIY Tangkap Dirut Taru Martani Yogyakarta, Tersangka Korupsi Lebih dari Rp18 Miliar,” <https://news.indozone.id/tau-gak-sih/914700074/kejati-diy-tangkap-dirut-taru-martani-yogyakarta-tersangka-korupsi-lebih-dari-rp18-miliar>, diakses 29 Mei 2025.

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), 2025, “Apa Itu Transaksi Multilateral,” <https://www.icdx.co.id/gofx-article/apa-itu-transaksi-multilateral>, diakses 28 Agustus 2025.

Shidarta Utama, 2020, “Kuliah Umum MAKSI-PPAk: Advancing Commodities Future Trading in Indonesia,” <https://feb.ui.ac.id/2020/12/22/kuliah-umum-maksi-ppak-advancing-commodities-future-trading-in-indonesia>, diakses 28 Agustus 2025.

Gunarto, Marcus Priyo. “Keterangan Ahli yang Dihadirkan oleh MK pada Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berikut Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor/UU PTPK) untuk Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024, Selasa 11 November 2025.” Mahkamah Konstitusi RI, diakses 28 November 2025. <https://www.mkri.id/berita/uji-uu-tipikor-syarat-adanya-kerugian-keuangan-negara-secara-nyata-24070>, diakses 28 November 2025.

UNCAC Coalition. “Asset Recovery (UNCAC Chapter V, Articles 51–59).” <https://uncaccoalition.org/learn-more/asset-recovery/>, diakses 30 Oktober 2025.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Keempat ditetapkan di Jakarta pada 10 Agustus 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diumumkan dengan Maklumat 30 April 1847, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, ditetapkan dan diumumkan pada 26 Pebruari 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.

Surat Edaran Bappebti Nomor 32/Bappebti/SE/02/2022 tentang Penegasan Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka yang Berhak Berhubungan Langsung dengan Nasabah dan Calon Nasabah.

Surat Edaran Bappebti Nomor 209/Bappebti/SE/06/2025 tentang Penyelenggaraan Elektronik Mediasi (E-Mediasi) di Bursa Berjangka dalam Proses

Penanganan Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

**Putusan Pengadilan:**

Pengadilan Negeri Yogyakarta. 2024. *Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Yyk*, Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 2024. *Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Yyk*, Yogyakarta.

Mahkamah Agung RI. 2025. *Putusan No. 4530/K/Pid.Sus/2025*. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi. 2013, *Putusan No. 48 dan 62/PUU-XI/2013*, Jakarta. tertanggal 18 September 2014.

Mahkamah Konstitusi, 2016, *Putusan No. 25/PUU-XIV/2016*, Jakarta. Tertanggal 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, tertanggal 18 September 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012.

**Wawancara:**

Abidin, Abdullah. *Komisioner Lembaga Ombudsman DIY periode 2021-2024 dan 2024-2028*. Yogyakarta.

Dianingrum, Dewi. *Kepala Kantor Cabang Rifan Financindo Berjangka–Perusahaan Pialang Berjangka di Yogyakarta*. Yogyakarta.

Joko Priyanto, Widayat. *Direktur PT. Taru Martani, BUMD di Yogyakarta*. Yogyakarta.

Paneswela Manik, Asia, *Legal Compliance pada Rifan Financindo Berjangka–Perusahaan Pialang Berjangka di Yogyakarta*.

Petersen, Roy. *Kepala Kantor Cabang Valbury Asia Futures – Perusahaan Pialang Berjangka di Yogyakarta*. Yogyakarta.